

2

JARINGAN SOSIAL DAN MOBILISASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017

Mikhael Lamabelawa

Universitas Nusa Cendana
Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Timur
Email: nxfgzj@gmail.com

Editor: Nursalam – Universitas Nusa Cendana

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan peristiwa kolektif yang ditandai dengan sebagian besar warga negara secara bersamaan mengambil bagian dalam bentuk partisipasi politik. Berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah bentuk keterlibatan politik yang sangat beragam sebagaimana bentuk perilaku politik lainnya juga dapat dipraktekkan oleh kelompok populasi yang lebih kecil dan lebih sempit sehingga bentuk praktik mobilisasi menjadi sangat spesifik. Secara teoritik, pemilihan kepala daerah secara langsung pada hakekatnya adalah pilihan yang paling demokratis. Hal ini karena rakyat diberi peluang yang seluas-luasnya untuk memilih pemimpinnya (Laurensius Sayrani dalam bengkel APPeK, 2008: 127). Ini menyiratkan bahwa partisipasi politik diperluas di hampir setiap kelompok masyarakat hanya dengan beberapa pengecualian yang sangat spesifik (misalnya anak dibawah usia 17 tahun) dalam memberikan suara. Lazarsfeld et al. dalam (Arzheimer et al, 2017:243), menyebutkan bahwa, karena tindakan pemungutan suara itu sendiri bersifat individual, maka keseluruhan proses yang mengarah pada keputusan memilih hanya dapat dipahami jika dampak jaringan sosial dipertimbangkan. Ini mengisyaratkan bahwa mobilisasi pada saat pemungutan suara mungkin berbeda dengan proses mobilisasi yang mengarah pada tindakan partisipasi politik lainnya

Dinamika Pemilukada Flores Timur 15 Februari 2017 dimana terdapat 6 pasangan calon yang bertarung yaitu pertama, Drs. Andreas Ratu Kedang dan Paulus Tokan Kopong Paron (Paket ANDE-PAUL) melalui jalur perseorangan. Kedua, Dr.Drs.Y.A.T. Lukman Riberu, M.Si dan Marianus Arkian Bulin (Paket LURUS) dengan partai pengusung; Nasdem Hanura dan PKPI. Ketiga, Yosep Lagadoni Herin, S.Sos dan Marius Payong

Paty (Paket Doa Ema) dengan partai pengusung; Golkar dan PPP. Keempat, Ir. Antonius Doni Dihen dan Theodorus Marthen Wungubelen (ANTERO) dengan partai pengusung ; Demokrat dan PKB. Kelima, dr. Yosep Usen Ama dan Michael Mel Ola Fernandez Lewai, ST (Paket Rumah Kita) melalui jalur perseorangan dan Keenam, Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST dan Agustinus Payong Boli, SH (BEREUN) diusung oleh partai Gerindra, PDIP dan PAN, terlihat jelas memperkuat basis kekerabatan melalui jaringan sosial sehingga dapat dikonversi kepada naiknya perolehan suara. Untuk itu, menjadi bagian dari jaringan yang dipolitisasi seringkali menyiratkan bahwa warga negara menjadi sasaran upaya mobilisasi tertentu (Arceneaux dan Nickerson, 2009:1-16).

Fenomena demikian memperlihatkan bahwa, keterlibatan instrumen jaringan sosial tidak dapat disepelekan. Kelompok aksi, kelompok ad-hock, gerakan sosial dan organisasi struktural lainnya telah berevolusi menjadi agen penggerak utama mobilisasi pemilih. Peran aktor jaringan sosial mulai dari menerima semua jenis informasi dan petunjuk dari partai dan pasangan calon mereka kemudian mendorong anggota jaringan untuk ikut serta dalam proses pemilihan sungguh sangat nyata. Akibatnya, aktor jaringan sosial ini jauh lebih mungkin melakukan upaya mobilisasi yang mengarah ke rata-rata tingkat partisipasi yang lebih tinggi.

Partisipasi yang tinggi ditandai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tanggal 15 Februari 2017 yang menunjukkan persentase partisipasi pemilih melebihi target nasional yaitu sebesar 78,9 persen dari target nasional 77,5 persen. (lihat tabel 1)

Tabel 1.
Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih	72.161	84.441	156.602
Pengguna Hak Pilih	56.995	66.590	123.585
Golput	21,0%	21,1%	21,1%
Partisipasi	79,0%	78,9%	78,9%

Sumber : Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017

Angka partisipasi yang melebihi target nasional tersebut, dapat dibaca selain merupakan bagian dari upaya partai politik dan penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum) dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, peneliti menduga adanya peran kuat

jaringan sosial. Bahwa faktor jaringan sosial sebagai agen mobilisasi pemilih menjadi penting untuk dipertimbangkan. Karena memiliki potensi yang dapat memberi warna tersendiri bagi hajatan politik tingkat lokal, maka menjalin relasi dengan jaringan sosial menjadi keharusan dan tidak dapat dihindarkan. Apalagi kemampuan aktor jaringan sosial yang mampu menciptakan suasana politik yang kondusif dan menciptakan rakyat yang partisipatif seperti dalam memobilisasi pemilih. Kontribusi nyata yang dilakukan para aktor jaringan sosial misalnya terlibat langsung dalam kampanye blusukan bersama pasangan calon kandidat menampilkan fenomena baru dan menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Kondisi ini sungguh menggerakkan kesadaran pemilih dalam menentukan pilihan. Selain itu, para aktor jaringan sosial juga memberikan pengaruh dan citra positif dimata masyarakat terhadap pasangan kandidat yang akan bertarung dalam pesta demokrasi. Dalam kondisi demikian, dapat dipersepsikan bahwa mesin politik berputar kencang mengeksploitasi habis-habisan akar kultural pemilih. Permainan politik membangun relasi dan membangun basis kekerabatan dengan aktor jaringan sosial berhasil menggiring opini pemilih, bahkan memobilisasi pemilih untuk menaikkan perolehan suara. Perilaku politik tradisional dalam masyarakat yang belum melek demokrasi pada akhirnya melahirkan “pemilih buta” yang menjatuhkan pilihannya dengan “rasa” dan bukan “rasio” (otak). Kehadiran pemilih buta yang diperkirakan sangat dominan karena memang masih kental dengan perang antar adat, suku, budaya dan wilayah yang telah lama terkotak-kotak akibat konsekwensi politik pecah belah bangsa penjajah. Para elit partai-pun senang mempermainkan strategi politik ini sebagai mesin pengumpul suara karena merupakan cara efektif, efisien dan tanpa resiko.

Hadirnya jaringan sosial dalam hajatan pemilihan kepala daerah bisa berdampak negatif terhadap demokrasi. Dapat diketahui bahwa tindakan para aktor jaringan sosial sering kali menghambat laju demokratisasi karena membentuk paradigma berpikir pemilih untuk mengakui perilaku pragmatisme. Hambatan tersebut diperparah dengan berbagai prakondisi masyarakat Flores Timur saat ini yang tidak kondusif bagi demokratisasi. Kemiskinan yang meluas dan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi, menjadikan masyarakat rentan terhadap godaan politik uang dan mudah dimobilisasi untuk berbagai tujuan yang tidak demokratis, seperti menentang hasil pemilu dengan kekerasan dan mendorong pemberlakuan kebijakan yang diskriminatif.

Tentunya penelitian ini penting karena memiliki urgensi untuk mengetahui bagaimana peran jaringan sosial, metode kerja dan

karakternya dalam proses hajatan pemilihan lokal yaitu dalam hal ini adalah proses mobilisasi pemilih pada Pemilukada Flores Timur tahun 2017. Apakah posisi dan peran jaringan sosial non partai sebagai pendorong demokratisasi ataukah sebaliknya membajak nilai-nilai demokrasi. Dalam penelitian ini penulis secara kritis menggali munculnya jaringan sosial non partai dalam politik lokal dan sejauh mana peran mereka dalam mendorong proses demokrasi di aras lokal sebagai upaya menciptakan pemilih yang partisipatif.

PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran jaringan sosial dalam upaya menciptakan pemilih yang partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu pilihan pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017?

KERANGKA TEORI

Teori Jaringan Sosial

Teori jaringan sendiri dikemukakan oleh Fukuyama (2002) yang mengemukakan bahwa jaringan merupakan hubungan kerja satu orang dengan orang lain yang diikat dengan nilai kepercayaan. Jaringan memungkinkan orang-orang mencapai tujuan kelompok jaringan dan mengikat masyarakat secara bersama-sama. Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam capital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005).

Pembahasan mengenai jaringan sosial sangat berkaitan dengan konsep *bonding* dan *bridging* dalam modal sosial. Dua konsep ini memiliki perbedaan tipe jaringan yakni internal dan eksternal (Woolcock dan

Narayan 2000:231). Dalam buku Handbook of Social Capital (Castiglione at al. 2008:59-60), Putnam memaparkan perbedaan antara modal sosial 'ikatan' (bonding) dan 'yang menjembatani' (bridging), yang mengacu pada konteks relasi sosial masyarakat. Bonding merupakan modal sosial eksklusif yang alami, dan berkembang dalam melihat 'ke dalam' (internal) dan kelompok eksklusif orang yang sama seperti ditemukan di gereja-gereja, Kelompok pembaca, atau organisasi etnis persaudaraan (paguyuban). Sedangkan hubungan sosial yang berfungsi sebagai 'menjembatani' dari modal sosial yaitu bridging yang berada "di luar kelompok" untuk mencari dan menjaring orang di seluruh lapisan sosial masyarakat". Modal sosial tersebut dapat ditemukan, misalnya, di dalam gerakan hak-hak sipil, kelompok suku-suku, kelompok pemuda, dan organisasi keagamaan.

Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (2012:177-178) mengatakan bahwa logika hubungan jaringan keterlibatan sosial dan partisipasi politik terletak pada terbukanya jaringan politik yang lebih luas melalui jaringan sosial. Keterlibatan dalam kegiatan sosial melalui kelompok-kelompok sosial membuka informasi dan komunikasi mengenai masalah publik, sehingga mendorong warga negara terkait dengan masalah tersebut. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam kelompok sosial sangat mungkin siap terlibat dalam mobilisasi politik oleh kelompok tersebut. Dengan demikian, terdapat hubungan kegiatan sosial (*civic engagement*) dengan aktif secara politik (*political engagement*).

Tebentuknya jaringan sosial, misalnya, secara operasional ditunjukkan melalui pemilihan electoral guna memperjuangkan dan mendorong partai politik dan calon-calonnya untuk memenangkan pemilu baik legislative maupun eksekutif. Yang terjadi di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 adalah banyaknya hubungan jaringan sosial yang dibangun oleh pasangan calon, dengan harapan mereka memperoleh suara yang tinggi. Munculnya jaringan sosial ini diukur berdasarkan partisipasi politik dan pilihan politik pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

Teori Modalitas

Harker, dkk (dalam politik elite muhammadiyah 1990:35) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum langsung seperti yang diterapkan Indonesia, setidaknya dibutuhkan tiga modal (*capital*) sebagai prasyarat agar seseorang kandidat dapat terpilih. Ketiganya saling membutuhkan, meski bukan berarti akan gagal total jika kekurangan salah satunya. Ketiga modal tersebut adalah modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), dan modal budaya (*cultural capital*). Perbedaan akses terhadap ketiga modal tersebut akan sangat menentukan

keberhasilan seseorang dalam mendapatkan peluang-peluang ekonomi, sosial, politik.

Ini bisa digunakan untuk membantu menjelaskan sepak terjang elite dengan menggunakan kaca mata ketersediaan dan ketiadaan tiga modal ala Bourdieu. (Richard Harker, dkk 1990:76) *Pertama*, adalah ketersediaan modal sosial (*social capital*). Menurut Putnam, modal sosial merujuk kepada kerangka-kerangka organisasi kemasyarakatan, seperti jejaring, norma norma, sikap saling mempercayai (*trust*) yang memungkinkan terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. *Kedua*, adalah ketersediaan modal ekonomi (*economy capital*). Seseorang bisa memiliki modal ekonomi karena hasil usahanya sendiri atau warisan dari leluhurnya. Masuk dalam kelompok ini adalah konglomerat, pengusaha, saudagar, dan pekerja profesional. Dalam konteks pemilu, modal ekonomi tidak selalu berarti modalnya sendiri. Seseorang kandidat juga bisa menggunakan modal ekonomi orang lain. *Ketiga*, ketersediaan modal budaya (*cultural capital*). Meminjam David Efendi, terminologi modal simbolik untuk menggantikan modal budaya. Modal budaya, merujuk pada Bourdieu, terkait dengan tingkat dan jenis pendidikan, kemampuan mengapresiasi seni, pengalaman budaya, dan keagamaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah cendekiawan, intelektual, akademisi, budayawan, seniman, dan tokoh agama. (Efendi David, 2014:38).

Karena politik membutuhkan aktor-aktor yang berwawasan luas dan kadar intelektualitas yang memadai, terutama untuk memahami, menganalisis dan mencari solusi atas berbagai masalah, sehingga modal budaya menjadi penting bagi siapapun yang berniat aktif dalam dunia politik. Tanpa itu, para pengambil kebijakan (*decision makers*) tidak akan mampu menawarkan kebijakan yang baik bagi masyarakat luas (*public good*).

Teori Mobilisasi

Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) sesuai dengan penjelasan pada Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci (2007:217) antara dua actor, individu dan partai. Konsep aktivitas mobilisasi terdiri dari 3 proses. proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi affective), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha actor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Suatu *variabel directional* diperkenalkan dalam rangka menggambarkan dengan tepat jenis hubungan yang berkembang antara partai dan individu.

Ada dua model dalam mobilisasi menurut Brigitta Nedelman,

(1987:181-202). Pertama, mobilisasi vertikal, yakni mobilisasi yang bekerja dalam hubungan vertikal. Kedua, mobilisasi horizontal, yakni menyertakan segala kemungkinan dari proses-proses internal dalam mobilisasi yang berlangsung antara partai dan individu. Zuckerman (dalam Kai Arzheimer et al, 2017:243) mengatakan bahwa perlu dipertimbangkan, pemungutan suara bukan hanya tindakan individu; pemilih adalah bagian dari kelompok sosial, dan didalam kelompok itulah mereka dimobilisasi untuk memilih dan juga mereka membuat keputusan tentang apakah hak suara mereka bermakna atau tidak. Oleh karena itu perilaku politik hanya bisa dipahami sebagai hasil dari proses sosial.

Praktek Mobilisasi

Firmansyah (2007:6; 21), mengemukakan bahwa dalam menjalankan mobilisasi, suatu partai politik mampu memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat dilakukan melalui political marketing. Marketing Politik adalah ilmu baru yang mencoba menggabungkan teori-teori marketing dalam kehidupan politik. Sebagai cabang ilmu, marketing politik memang bisa dikatakan masih bayi, tetapi kehadirannya telah menjadi trend dalam ranah politik di negara maju yang menganut demokrasi. Partai politik dan kandidat perseorangan berlomba memanfaatkan ilmu ini untuk strategi kampanye baik untuk memobilisasi pemilih, mendapatkan dukungan politik dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) maupun untuk memelihara citra sepanjang saat dalam jeda Pemilu.

Nursal (2004:295-298), Pada dasarnya marketing politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting marketing politik yang menentukan pihak-pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.

Bagi partai-partai politik maupun kandidat, sekurang-kurangnya konsep marketing politik dapat dilakukan melalui beberapa metode (Paul Baines dkk.: Middlesex University Discussion Paper Series, No. 7, July 1999): Mengkomunikasikan pesan dan gagasan. Mengembangkan identitas jati diri, kredibilitas dan transparansi. Interaksi dan respons dengan komunitas internal dan eksternal dengan melakukan pencitraan partai politik. Menyediakan pelatihan, mengolah dan menganalisis data untuk kepentingan kampanye. Secara terus menerus mempengaruhi dan mendorong komunitas untuk mendukung partai politik.

Melalui pertimbangan diatas, marketing politik bertujuan untuk:

1. Menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik.
Dalam hal ini pemilih tidak hanya sekedar suara yang diperebutkan

partai dengan berbagai tawaran produknya, tetapi pemilih ikut menentukan program dan produk-produk politik apa yang seharusnya dilakukan partai politik.

2. Menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih adalah langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dalam kerangka masing-masing ideologi partai politik.

Marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan perangkat bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan, mobilisasi dan selanjutnya memperoleh dukungan suara.

Jenis Mobilisasi

Nedelmann (1987:181-202), Mobilisasi dikategorikan dalam 2 bentuk, yakni mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pengerahan terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki partai politik. Mobilisasi tidak langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk memengaruhi cara pikir atau cara pandang pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih.

Perbedaan kategori antara mobilisasi langsung dan tidak langsung berdasar pada mekanisme-mekanisme mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik. Mobilisasi langsung dapat dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi melalui mekanisme partai politik kepada para pemilih. Sedangkan mobilisasi tidak langsung dapat dilakukan dengan kampanye-kampanye langsung maupun melalui media-media. Mobilisasi langsung, semisal adalah menggerakkan simpatisan partai untuk melakukan konvoi jalanan, untuk melakukan aksi-aksi politik, dan lain sebagainya. Mobilisasi tidak langsung, semisal adalah iklan-iklan politik di media masa, seminar-seminar partai, kampanye dialogis, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus dalam penelitian ini adalah pada peran jaringan sosial non partai menggunakan instrument mobilisasi politik dalam mendukung pasangan calon nomor urut 4 (empat) Ir. Antonius Doni Dihen dan Theodorus Marthen Wungubelen (Paket ANTERO) dan pasangan calon nomor urut 6 (enam) Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST dan Agustinus Payong Boli, SH (Paket BEREUN). Untuk menunjukkan bukti adanya afek jaringan maka alasan peneliti fokus pada dua pasangan calon adalah yang: *pertama*, menggunakan pengukuran agregat, yaitu berdasarkan hasil perolehan suara dimana Paket ANTERO berada di posisi kedua setelah Paket BEREUN dengan selisih suara 2.989 suara. Hal ini kemudian dipertegas dengan interaksi peneliti terhadap orang-orang penting dari kedua pasangan calon tersebut, menunjukkan adanya peran jaringan sosial atas tingginya partisipasi pemilih yang diperoleh. *Kedua*, memiliki preferensi informasi yang dilaporkan oleh anggota jaringan yang dibentuk, dengan kecenderungan kuat terhadap orang-orang penting yang sependapat dengan informasi dari anggota jaringan tersebut.

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan model intraktif Miles dan Huberman (1992:20). Langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif antara lain :

1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan kumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis.

Proses validasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seluruh stakeholder.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Politik Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan 101 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah itu terdiri dari 7 provinsi, 18 Kota serta 76 kabupaten. Untuk Provinsi NTT terdiri dari 1 Kota dan 2 Kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Di Kabupaten Flores Timur terdapat enam pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang lolos seleksi administrasi dan pada tanggal 24 Oktober 2016, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Pleno Terbuka dengan Keputusan KPU No.65/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur tahun 2017. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur tahun 2017 sebagai berikut. (Lihat Tabel)

Tabel 2.
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

Pasangan Calon	Jalur/ Pengusung Politik
<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
No. Urut 1: Drs. Andreas Ratu Kedang dan Paulus Tokan Kopong Paron (Paket ANDE-PAUL)	Jalur perseorangan
No. Urut 2: Dr.Drs.Y.A.T. Lukman Riberu, M.Si dan Marianus Arkian Bulin (Paket LURUS)	Nasdem, Hanura dan PKPI
No. Urut 3: Yosep Lagadoni Herin, S.Sos dan Marius Payong Paty (Paket Doa Ema)	Golkar dan PPP
No. Urut 4: Ir. Antonius Doni Dihen dan Theodorus Marthen Wungubelen (ANTERO)	Demokrat dan PKB
No. Urut 5: dr. Yosep Usen Ama dan Michael Mel Ola Fernandez Lewai, ST (Paket Rumah Kita)	Jalur perseorangan
No. Urut 6: Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST dan Agustinus Payong Boli, SH (BEREUN)	Gerindra, PDI Perjuangan dan PAN

Sumber : Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahai bahwa dari Enam pasangan calon yang mendaftar di KPU terdapat dua paket pasangan calon perseorangan, masing-masing Yoseph Usen Aman-Mell Fernandez dan Andreas Ratu Kedang-Paul Tokan. Sementara, empat paket pasangan calon yang diusung oleh partai politik adalah Anton Doni Dihen-Rut Wungubelen (Partai Demokrat dan PKB); Antonius Gege Hadjon-Agus Boli (Gerindra, PDI Perjuangan dan PAN), Lukman Riberu-Marianus Arkian Bulin (Nasdem,

Hanura dan PKPI), dan Yosep Lagadoni Herin (petahana) dengan Marius Payong Paty (Golkar dan PPP).

Hasil penetapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Flores Timur (berturut-turut mulai dari Paket dengan perolehan suara terbanyak), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menetapkan pasangan Anton Hadjon-Agus Boli (BEREUN) memperoleh suara terbanyak 32.947 suara. Pasangan Doni Dihen-Ruth Wungebelen (ANTERO) 29.800 suara. Pasangan Lukman-Marianus (LURUS) 22.859 suara. Pasangan Yosni-Marius (DOA EMA) 16.999 suara. Pasangan Yos-Mel (RUMAH KITA) 11.613 suara dan pasangan Ande-Paul 7.319 suara dengan perolehan suara paling rendah. Sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. Berdasarkan hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur, KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan pasangan Anton Hadjon-Agus Boli (BEREUN) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Flores Timur periode 2017-2022.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017.

Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Flores Timur tergolong tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 lalu, dimana masyarakat yang menggunakan hak pilihnya melampaui target yang ditetapkan KPU RI. Berikut tabel partisipasi pemilih perkecamatan tahun 2017 (lihat Tabel 3)

Tabel 3.
Partisipasi Pemilih per Kecamatan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Adonara	6.420	5.175	80,6 %
2	Adonara Barat	7.223	6.054	83,8 %
3	Adonara Tengah	6.980	5.641	80,8 %
4	Adonara Timur	17.589	12.837	73,0 %
5	Demon Pagong	3.379	2.613	77,3 %
6	Ile Boleng	9.589	7.048	73,5 %

No	Nama Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase
7	Ile Bura	3.939	3.343	84,9 %
8	Ile mandiri	6.110	5.273	86,3 %
9	Kelubagolit	10.476	6.364	60,7 %
10	Larantuka	23.894	19.236	80,5 %
11	Lewolema	5.140	4.388	85,4 %
12	Solor Barat	5.755	4.865	84,5 %
13	Solor Selatan	3.172	2.642	83,3 %
14	Solor Timur	8.016	6.360	79,3 %
15	Tanjung Bunga	8.129	6.353	78,2 %
16	Titehena	6.972	5.961	85,5 %
17	Witihama	10.035	8.323	82,9 %
18	Wutun Ulumado	5.169	3.954	76,5 %
19	Wulanggitang	8.615	7.155	83,1 %

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur 2017

Dari sembilan belas kecamatan di Kabupaten Flores Timur, partisipasi pemilih Kecamatan Kelubagolit berada pada angka paling rendah yaitu 60,7%. Namun untuk tingkat Kabupaten, partisipasi pemilih di Kabupaten Flores Timur sangat tinggi bahkan melampaui persentase yang distandarkan oleh KPU Republik Indonesia. Data partisipasi perkecamatan diatas jika diuraikan dalam perolehan suara enam pasangan calon maka masing-masing pasangan calon memperoleh persentase suara sebagai berikut. (Lihat tabel 4.6):

Tabel 4.
Jumlah dan persentase perolehan suara
pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentasi
No Urut 1: Drs. Andreas Ratu Kedang dan Paulus Tokan Kopong Paron	7.325	6,02%
No. Urut 2: Dr.Drs.Y.A.T. Lukman Riberu, M.Si dan Marianus Arkian Bulin	22.860	18,79%
No. Urut 3: Yosep Lagadoni Herin, S.Sos dan Marius Payong Paty	16.952	13,94%
No.Urut 4: Ir. Antonius Doni Dihen dan Theodorus Marthen Wungubelen	29.930	24,60%
No. Urut 5: dr. Yosep Usen Ama dan Michael Mel Ola dan Fernandez Lewai, ST	11.656	9,58%
No. Urut 6: Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST dan Agustinus Payong Boli, SH	32.919	27,06%

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur 2017

Pasangan nomor urut 6 Antonius Hubertus Gege Hadjon ST dan Agustinus Payong Boli, SH memperoleh suara terbanyak dengan persentasi 27,06% sehingga ditetapkan oleh KPU Flores Timur sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017 masa jabatan 2017-2022.

Analisis Pola Jaringan sosial

Kontestasi partai dan pasangan calon dalam merebut jabatan terpilih (*elected official*) sangat tergantung dari interaksi yang dibangun dengan aktor jaringan sosial dalam arena kompetisi politik lokal. Dalam proses kompetisi tersebut, terjalin konsolidasi yang baik mulai dengan bertemu, bersentuhan langsung dan membangun jaringan dengan aktor jaringan sosial lainnya sehingga Pemilukada Flores Timur menjadi arena interaksi antar jaringan aktor politik lokal di Flores Timur.

Relasi yang dibangun oleh para pasangan calon dengan para tokoh jaringan sosial dengan keyakinan agar mereka bisa memobilisasi massa. Tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Flores Timur khususnya di Pulau Adonara dan Solor lebih memiliki pengaruh dibandingkan dengan di Daratan Larantuka. Pendekatan calon untuk wilayah Daratan Larantuka Lebih cenderung pada jaringan anak muda. Di Pulau Adonara misalnya, paket BEREUN datang di Rumah Adat Kampung Gelong (Lango Belen Lewo Gelong) 5 Januari 2017, kemudian pertemuan itu disaksikan langsung oleh penduduk kampung tersebut. Hal inilah yang nantinya berdampak positif dalam menentukan pilihan masyarakat. Dengan pertemuan tersebut, masyarakat kampung kemudian mengasumsikan bahwa tokoh adat dan tokoh masyarakat secara simbolik sudah menjatuhkan pilihannya terhadap pasangan calon tersebut.

Hal yang menarik bahwa di beberapa desa tokoh adat dan tokoh masyarakat dimasukan dalam tim pemenangan sehingga masyarakat desa tersebut dijadikan referensi politik dalam menentukan pilihan. Sebagaimana temuan peneliti dilapangan menunjukkan adanya relasi khusus yang dibangun aktor politik dengan aktor lokal non politik yang dipercaya dapat mengarahkan pemilih. Berikut pola jaringan partai politik dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 lalu, digambarkan dalam pola relasi yang dibangun oleh partai politik dan pasangan calon terhadap tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (Lihat bagan 4.2)

Gambar Bagan 1.
Pola jaringan Partai Politik dan Pasangan Calon
Dalam Pemilukada Flores Timur Tahun 2017



Pola jaringan partai politik dan jaringan sosial dalam Pemilukada Flores Timur tahun 2017 diatas, sebagaimana dikemukakan Allan dalam liliweri (2014:22) tentang interaksi sosial, menggambarkan proses yang kompleks yang dilakukan ketika orang itu (aktor jaringan sosial) mengorganisasikan/menginterpretasikan persepsi dia tentang orang lain (partai dan pasangan calon) dalam situasi bersama sehingga menimbulkan kesan mengenai siapakah orang lain itu, apa yang sedang mereka buat, dan apa sebab mereka berbuat seperti itu.

Selain interaksi sosial, faktor modalitas juga berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang mendapatkan peluang ekonomi, sosial dan politik. Richard Harker, Dkk (1990:76) menggunakan kaca mata ketersediaan dan ketiadaan tiga modal ala Bourdieu yaitu: *pertama*, ketersediaan modal sosial (*social capital*). *Keuda*, ketersediaan modal ekonomi (*economy capital*). *Ketiga*, ketersediaan modal budaya (*cultural capital*). Interaksi dalam pola jaringan partai dan pasangan calon di atas dapat diketahui, modal kekuatan Pasangan Antonius Doni Dihen dan TheodorusMarthenWungubelen tidak hanya dengan modal sosial dengan membangun hubungan saling mempercayai (*trust*) yang mewujudkan koordinai dan kerja sama dengan jaringan Anak muda yang handal menggunakan teknologi modern seperti aplikasi jejaring sosial facebook dalam melancarkan strategi kampanye. Tetapi juga dengan modal budaya yaitu dengan membanugun relasi dengan tokoh masyarakat. Ini terbukti dengan ikut terlibatnya tokoh masyarakat dalam setiap kunjungan paket ANTERO ke desa-desa.

Mencermati padangan informan dari kubu ANTERO dan BEREUN di atas dapat diketahui bahwa jaringan sosial merupakan platform strategi

politik yang dibangun oleh Kedua Pasangan Calon dalam Pemilukada Flores Timur. Partai politik justru memainkan peran yang lebih terbatas dalam mengorganisir kampanye dan tindakan mobilisasi untuk mendukung kandidat. Namun, ini tidak berarti bahwa partai politik sama sekali tidak dilibatkan dalam proses mobilisasi suara. Justru kandidat yang menjabat sebagai pengurus utama partai politik mampu mendominasi partai dan secara efektif mampu menggerakkan kepengurusan di tingkatan cabang dari partai tersebut untuk menjadi tim sukses pribadinya. Dalam suatu hajatan politik yang sangat kompetitif, pasangan calon dari jalur partai biasanya sangat bergantung kepada Pengurus di tingkat kecamatan, para PAC dan kader partai. Mereka inilah yang biasanya menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon. Misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), temuan peneliti dilapangan menunjukkan sejauh ini merupakan partai politik yang paling terorganisir dan sistematis. Dengan mengusung ketua DPD PDIP Kabupaten Flores Timur yaitu Antonius Hubertus Gege Hadjon, sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Agustinus Payong Boli. Dan yang menjadi tim sukses pasangan nomor urut 6 adalah orang-orang yang berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sendiri.

Analisis Peran Konteks Sosial Dalam Proses Mobilisasi Pemilih berdasarkan Faktor Penentu Pilihan Pemilih

Peneliti meninjau peran konteks sosial dalam proses mobilisasi pemilih sebagaimana yang dikemukakan oleh Marc Hooghe dalam (Arzheimer et.al., 2017:242) dengan memperkenalkan perbedaan antara tiga faktor penentu pilihan pemilih yang potensial yaitu jaringan formal, jaringan informal dan konteks geografis. Penelitian tentang jaringan menunjukkan bahwa masing-masing faktor memiliki efek spesifik pada perilaku pemungutan suara. Bahwa interaksi yang dibangun memiliki kesamaan karena aktor yang tertanam didalamnya akan cenderung mempertimbangkan pandangan yang diungkapkan dari anggota jaringan lainnya saat menentukan posisi dan preferensi mereka sendiri.

Jaringan formal; Kehadiran partai politik sebagai bagian dari menumbuhkan demokrasi sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan bahwa partai politiklah yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Maknanya adalah agar proses politik dalam pemilihan umum jangan sampai menghilangkan eksistensi partai politik. Sekalipun ada penilaian negatif kepada partai politik, bukan berarti menghilangkan eksistensi partai dalam berdemokrasi. Peran dan fungsi yang dimiliki oleh partai politik seharusnya berjalan secara rutin, dan juga mengambil peran nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan sebuah partai politik sangat kurang dirasakan dalam

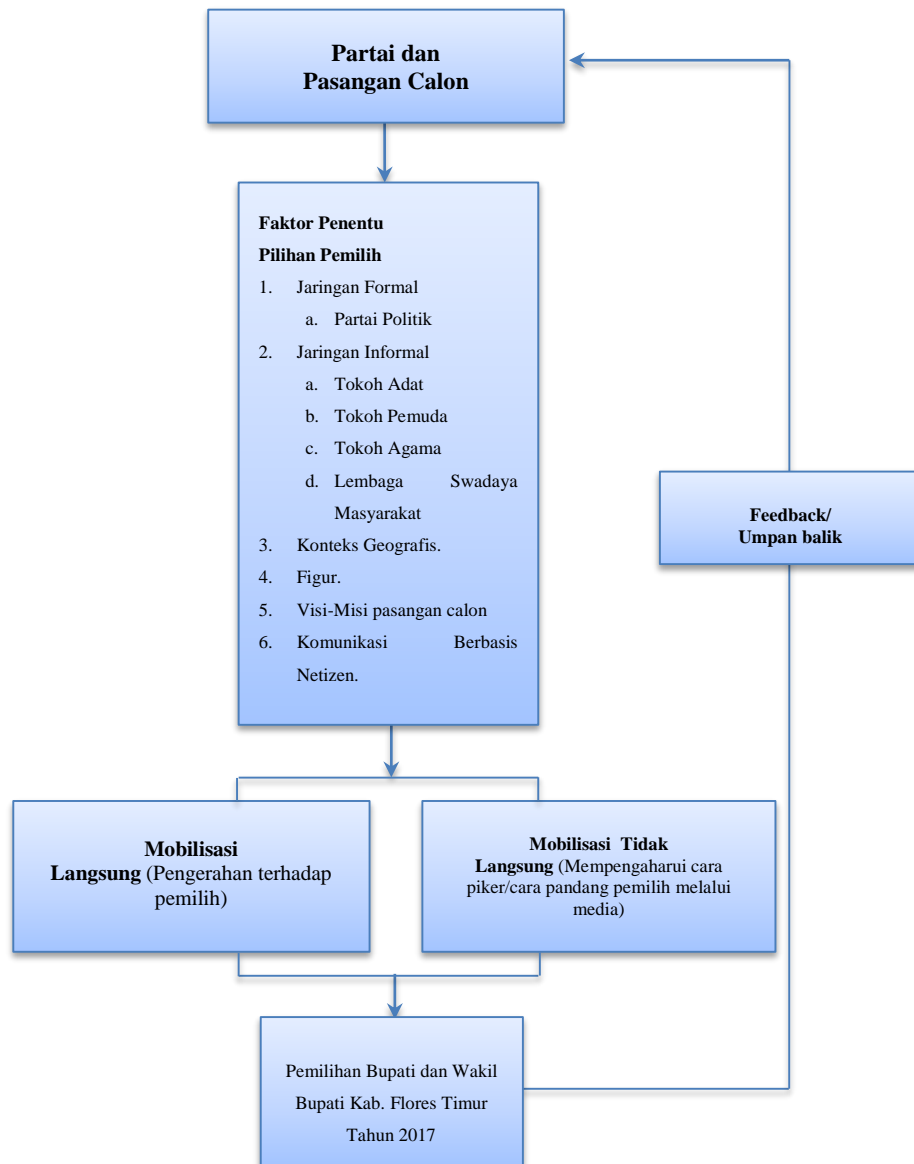
kehidupan sehari-hari bahkan hanya hadir ketika dilaksanakan sebuah hajatan politik. Partai politik hanya memanfaatkan tahapan demokrasi untuk kepentingan pribadi partai. Peran partai yang cenderung dilaksanakan menjelang suatu hajatan politik ternyata juga tidak mudah. Pemikiran bahwa partai politik tinggal hidupkan mesin partai saat dibutuhkan sangat keliru. Bahwa elemen partai yang saling terkait membutuhkan suatu persiapan yang matang sehingga dapat optimal dalam upaya pencapaian hasil yang diharapkan.

Jaringan Informal; Hooghe dalam (Kai Arzheimer et al, 2017:250), mengemukakan bahwa mobilisasi pemilih bukan hanya dipengaruhi oleh partai politik dan organisasi afiliasi melainkan jaringan informal yang juga sama pentingnya. Penelitian lainnya juga telah berulang kali menunjukkan bahwa keluarga menjadi sangat relevan sebagai jaringan informal dalam mempengaruhi sikap dan perilaku politik. Mitra interaksi dalam jaringan seseorang sangat mungkin untuk berbagi status sosio ekonomi yang sama, tingkat pendidikan, tradisi agama dan kebiasaan budaya. Karena kemiripan ini mereka juga menjadi relevan sebagai model peran politik potensial yang sebagian besar memiliki kepentingan dan preferensi ideologis yang sama. Kehadiran dan interaksi yang berkelanjutan, cenderung memperkuat pilihan dan preferensi politik tertentu. Pemilukada Flores Timur dengan Persaingan yang ketat untuk memperoleh suara terbanyak memicu pasangan calon mencari jalan lain selain mesin partai. Pemanfaatan jaringan sosial adalah usaha-usaha dalam mengerahkan pemilih dari unsur-unsur diluar partai.

Konteks Geografis; Dalam konteks geografis, Pasangan calon mesti memahami budaya lokal setempat, modal budaya menjadi penting bagi siapapun yang berniat aktif dalam dunia politik, karena politik membutuhkan aktor-aktor yang berwawasan luas dan kadar intelektualitas yang memadai, terutama untuk memahami, menganalisis dan mencari solusi atas berbagai masalah. Tanpa itu, ketika berperan sebagai pengambil kebijakan (*decision makers*) tidak akan mampu menawarkan kebijakan yang baik bagi masyarakat luas (*public good*). Pandangan Informan-informan tersebut di atas, menunjukkan konteks geografis dimana Pasangan calon itu tinggal, memiliki dampak terhadap pengerahan massa dan naiknya perolehan suara, meskipun dalam penelitian ini peneliti juga melihat peran media sosial (*medsos*) telah terbukti memiliki efek mobilisasi yang kuat. Temuan peneliti dalam konteks geografis adalah penggunaa teknologi baru dan jejaring sosial sebagai bentuk baru konsolidasi jaringan. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Partai Demokrat Samson Padak, bahwa jaringan partai dengan menggunakan media sosial memberi pengaruh baru terhadap mobilisasi

pemilih. Konsolidasi yang mulanya secara konvensional *face to face*, beralih menjadi lebih mudah dengan menggunakan teknologi android dan aplikasi jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram. Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menunjukkan kerangka konseptual hasil penelitian sebagaimana tersaji pada gambar 4.4 dibawah ini:

Gambar Bagan 4.4
Kerangka Konseptual Hasil Temuan Penelitian



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa relasi jaringan yang dibangun oleh partai dan pasangan calon terhadap jaringan sosial memberikan keberhasilan dalam meraih dukungan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017. Lebih dari itu jaringan sosial mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Hadirnya para aktor jaringan sosial ditingkat lokal memberi warna tersendiri dalam dinamika perpolitikan pada Pemilukada Flores Timur tahun 2017. Posisi sosial (kedudukan) aktor jaringan sosial akan berpengaruh kepada masyarakat, dimana dengan struktur itu masyarakat akan merasa aman dalam lingkungan bermasyarakat dan aktor tradisional akan memelihara adat dan nilai tersebut.

Dalam mendukung partai dan pasangan calon figur jaringan sosial juga tidak semata-mata mengandalkan posisi sosialnya tetapi juga memiliki kemampuan intelektual, kecerdasan, serta bersikap ramah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Berkat kemampuan tersebut, mereka berkontribusi dengan menjadi penghubung atau relawan (*volunteer*) dengan pemilih. Karena persaingan yang ketat, partai dan pasangan calon bergerak cepat dalam menentukan strategi kampanye melalui pengerahan saat pemungutan suara. Berbagai cara dilakukan untuk mepengaharui pemilih. Beberapa bentuk pengerahan dalam Pemilukada Flores Timur 2017 dibagi dalam dua dikategori yaitu *Pertama*, Bentuk pengerahan oleh partai secara langsung meliputi instruksi melalui mekanisme partai politik kepada pemilih dan. *Kedua*, Bentuk pengerahan oleh partai secara tidak langsung berupa kampanye dan melalui media-media. Metode yang digunakan adalah *pertama*, dengan memanfaatkan mesin partai pengusung dan *kedua*, menggunakan jaringan sosial seperti ketokohan, aktor jaringan sosial yang direkrut ke-dalam struktur partai.

Berdasarkan faktor-faktor penentu pilihan pemilih, dapat diketahui dukungan yang diberikan oleh jaringan sosial sangat beragam. Misalnya untuk tokoh adat, bentuk kontribusi yang diberikan terhadap kandidat adalah menjadi penghubung antara pemilih dengan partai dan pasangan calon. Tokoh agama lebih mengandalkan modalitas simbolik dengan melakukan khotbah dan ceramah di mimbar-mimbar gereja maupun masjid. Tokoh pemuda lebih mengedepankan pengerahan pemilih dengan menjadi relawan/ *volunteer* sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki cara tersendiri dengan membuka diri bagi partai dan pasangan calon mensosialisasi visi-misi dan program kerja mereka terhadap anggota LSM.

Dari berbagai relasi yang dibangun, faktor yang lebih dominan adalah peran tokoh adat. Tokoh adat merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam

mewujudkan harapan serta keinginan masyarakat sehingga tokoh adat menjadi panutan dan penyambung lidah masyarakat. Tokoh adat membangun hubungan emosional berdasarkan kekeluargaan dan persaudaraan (*family relation*) sehingga peran ini menjadi faktor paling kuat dalam mobilisasi pemilih.

Sementara faktor tokoh agama, tokoh pemuda dan LSM serta bentuk bantuan-bantuan, merupakan faktor ikutan setelah peran tokoh adat. Sehingga dalam pemilihan, seorang pemilih berpotensi mengalami beragam bentuk mobilisasi. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa jaringan sosial menjadi agen yang sangat berperan dalam keberhasilan kandidat sekaligus menjadi faktor penentu tingginya partisipasi pemilih pada Pemilukada Flores Timur tahun 2017.

SARAN

Pertama, partai harus menyadari peran dan posisinya dalam pemilu. Sebagai peserta pemilu partai harus lebih punya peran dalam pembangunan demokrasi dengan menunjukkan perilaku positif sebagai pendidikan politik bagi pemilih meskipun kondisi masyarakat sangat mendorong untuk pasangan calon melakukan perilaku negatif dalam pengerahan pemilih.

Kedua, partai pengusung Paket ANTERO (Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat), belum siap sebagai kontestan Pemilukada Flores Timur tahun 2017. Ketidaksiapan ditunjukkan dengan belum terbentuknya jaringan politik hingga tingkat paling bawah sehingga hal yang harus dibenahi adalah membentuk struktur partai di aras bawah karena hubungan antar konstituen dan partai sebenarnya dapat terbangun di level ini.

Ketiga, korelasi jaringan sosial terhadap pemilih yang partisipatif dalam Pemilukada Flores Timur tahun 2017, membuktikan jaringan sosial sebagai agen sosialisasi pendidikan pemilih yang potensial oleh penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Flores Timur. Peneliti merekomendasikan agar sosialisasi terhadap pemilih tidak hanya dengan penyebaran baliho, spanduk, Pamflet, stiker dan selebaran seperti yang telah dilakukan selama ini tetapi kedepannya harus berbasis pada simpul-simpul jaringan sosial.

Keempat, diperlukan penelitian lanjutan terhadap keefektifan komunikasi elektronik sepanjang masa kampanye pemilihan sehingga diketahui peran media elektronik berkorelasi positif terhadap mobilisasi pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adman Nursal. (2004), *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Agusyanto, Ruddy. "Jaringan Sosial dan Kebudayaan: Kasus Arek-Arek Suroboyo. Sebuah Abstraksi Skripsi" dalam *Media Ika No. 13/XIX, hlm. 13-37*. Jakarta: Ikatan Kekerabatan Antropologi FISIP UI, 1991.
- Antonius, Bungaran. Dkk (2013), *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Arceneaux, K. & Nickerson, D. (2009). Who Is Mobilized to Vote? A Re-Analysis of 11 Field Experiments. *American Journal of Political Science*, 53(1), 1-16
- Arzheimer et al. (2017), *The SAGE Handbook of Electoral Behaviour*. Los Angeles: SAGE Publications Ltd; SAGE Publications Inc; SAGE Publications India Pvt Ltd; SAGE Publications Asia-Pacific Pte Ltd.
- Beckford, James A. (1991). Politics and Religion in England and Wales. *Jurnal Daedalus: Religion and Politics*, 120(3):179-201
- Birgitta Nedelmann. (1987), *Individuals and Parties - Changes in Processes of Political Mobilization*, European Sociological Review Vol 3 No.3, Oxford University Press.
- Budiarjo, Miriam. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik :Edisi Revisi Cetakan kesembilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Castiglione, D. et.al. (2008). *Social Capital's Fortune An Introduction*. In Dario Castiglione, et.al (ed). *The Handbook of Social Capital*. New York : Oxford University Press
- Creswell John.W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar, MA. (2010), *Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Efendi David. (2014). *Politik Elite Muhammadiyah. (studi tentang fragmentasi elite muhammadiyah)*. Yogyakarta, Reviva Cendekia.
- Firmansyah. (2007), *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- GorisSeran, Gotfridus. (2013). *Kamus Pemilu Populer (Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Harrison, Lisa. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.

- Herdiansyah, haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- IDEA. (2002). *Standard-standard Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Sweden: IDEA.
- Karp, Jeffrey & Banducci, Susan. (2007). *Party Mobilization and Political Participation in New and Old Democracies*. Party Politics. VOL 13. No.2 pp. 217–234 SAGE Publication London, Los Angeles, New Delhi, Singapore.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Lawang, R.M.Z. (2005). *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi*. Cetakan Kedua. FISIP UI Press.
- Liliwari, Aloysius. (2014). *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Perrett, Roy W. (1997). Religion and Politics in India: Some Philosophical Perspectives. *Religious Studies*, 33(1):1-14
- Richard, Harker, dkk (ed.). (1990), *dalam buku pengantar paling komprehensif kepada pemikiran Pierre Bourdieu, (Habitus x modal) + ranah = praktik*, Terj. Yogyakarta: jalan sutra.
- Saiful Mujani, R. William Liddle, & Kuskridho Ambardi. (2012). *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan Publika.
- Stainback, Susan willemStainback. (1988), *Understanding & Conducting Qualitative Research*, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta Indonesia.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, Ramlan (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Taylor, J. L. (2001). *Embodiment, Nation, and Religiopolitics in Thailand*. South East Asia Research 9(2):129-147
- Woolcock, M. D. Narayan. (2000). *Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy*. *World Bank Research Observer*, 15(2), August, 225-49. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.